

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA

Oleh: Kinasih Puji Utami*, Dani Krisnawati**

ABSTRAK

Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta serta mengetahui hambatan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden dan narasumber serta data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta sudah terpenuhi yaitu ditempuh dengan jalur pendidikan formal berupa sekolah di sekolah formal dan jalur pendidikan nonformal yaitu dengan mengikuti pendidikan kesetaraan lewat Kejar Paket serta dengan bimbingan-bimbingan yang disediakan BPRSR Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan baik dari segi anak, orang tua, sarana prasarana, petugas, maupun anggaran. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah merintis pembentukan sekolah pendamping; merintis pengadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); kerjasama dengan instansi-instansi pendidikan, lembaga pemerintah, serta organisasi kemahasiswaan; pemanfaatan sarana prasarana yang ada secara maksimal; melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terhadap petugas; dan melakukan koordinasi dan evaluasi terkait pembiayaan pemenuhan hak pendidikan yang ada di BPRSR Yogyakarta.

Kata Kunci: Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Hak Pendidikan.

* Mahasiswa Stara-1 (S-1) pada Departemen Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Dosen pada Departemen Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

THE IMPLEMENTATION OF FULFILLMENT OF EDUCATIONAL RIGHTS IN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA

By: Kinasih Puji Utami* , Dani Krisnawati**

ABSTRACT

This legal research is aims to determine the implementation of the fulfillment of educational rights in Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta and to investigate the barriers to the fulfillment of education rights in Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta and the efforts to overcome those barriers.

This research is categorized into normative-empirical legal research with descriptive type of research. The types of data used in this research are primary data obtained from interviews with respondents and interviewees while secondary data obtained from document analysis. The data obtained during this research is analyzed qualitatively with descriptive argumentation.

Based on this legal research, it can be concluded that the implementation of the fulfillment of educational rights in Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta has been fulfilled through formal education in the form of schools in formal schools and non-formal education through equivalency education program by joining Kejar Paket and with the other forms of guidance provided by the BPRSR Yogyakarta. On its implementation there are obstacles coming from the children, parents, facilities, functionary, and budget. To overcome those problems, there are several ways that can be done, they are pioneer the establishment of “Sekolah Pendamping”, pioneer the procurement of Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), collaboration with educational institutions, government institutions, and student organizations, the maximum use of existing infrastructure, socializing and training functionary, and the implementation of coordination and evaluation related to the financing of the fulfillment of educational rights in the BPRSR Yogyakarta.

Keywords: Children Aged Under 12 (Twelve) Years Old, Children facing legal problems, Educational Rights.

* Undergraduate Student in Criminal Law Department at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Lecturer in Criminal Law Department at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.